

# Fenomena Kelimpahan Sumber Daya Alam dan *Natural Resource Curse* Dalam Perspektif Ekonomi Di Pulau Sumatera

Finka Amalia<sup>1</sup>, Zulfa Emalia<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [finkaamalia22@gmail.com](mailto:finkaamalia22@gmail.com)

**Abstrak**– Kelimpahan sumber daya alam merupakan anugerah bagi wilayah yang memilikinya. Namun terdapat paradoks yang menyebutkan bahwa kelimpahan sumber daya alam dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan perekonomian, fenomena ini disebut dengan *Natural Resource Curse*. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa kelimpahan sumber daya alam dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan perekonomian. Penelitian ini akan menguji apakah fenomena *Natural Resource Curse* pada tingkat provinsi di Pulau Sumatera dalam periode 2014-2019 dan menguji besaran nilai dari *Natural Resource Curse* tersebut dengan menggunakan indeks yang dinamakan *Regional Resource Curse Index* (RRCI) dengan dua indikator yakni, *Natural Resource Curse Index* (NRDI) dan *Regional Sustainable Development Index* (RSDI). Penelitian menggunakan analisis regresi data panel, dilakukan dengan cara melihat pengaruh kelimpahan sumber daya alam terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelimpahan sumber daya alam yang menggunakan danabagi hasil pertambangan dan migas berpengaruh positif dan tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut membuktikan bahwa fenomena *Natural Resource Curse* tidak terjadi pada tingkat provinsi di Pulau Sumatera pada periode 2014-2019. Namun berdasarkan nilai RRCI, menunjukkan bahwa provinsi dengan sumber daya alam tambang yang lebih kaya cenderung menghadapi fenomena *Natural Resource Curse* yang lebih tinggi. Hasilnya Provinsi Jambi merupakan wilayah dengan RRCI terendah sebesar 1,26, dengan NRDI sebesar 54,9 dan RSDI sebesar 53,9.

**Kata Kunci:** Resource Curse<sup>1</sup>, Regional Resource Curse Index (RRCI)<sup>2</sup>, Natural Resource Curse Index (NRDI)<sup>3</sup>, Regional Sustainable Development Index (RSDI)<sup>4</sup>, Sumatera<sup>5</sup>

**Abstract** *Abundance of natural resources is a boon for the region that has them. However, there is a paradox that states that the abundance of natural resources can have a negative effect on economic growth, this phenomenon is called the Natural Resource Curse. Several studies have found that the abundance of natural resources can have a negative effect on economic growth. This study will examine whether the Natural Resource Curse phenomenon at the provincial level on Sumatra Island in the 2014-2019 period and examine the value of the Natural Resource Curse by using an index called the Regional Resource Curse Index (RRCI) with two indicators namely, the Natural Resource Curse Index (NRDI) and the Regional Sustainable Development Index (RSDI). The research uses panel data regression analysis, conducted by looking at the effect of the abundance of natural resources on economic growth. The results showed that the abundance of natural resources that used mining and oil and gas revenue-sharing had a positive and insignificant effect on economic growth. This proves that the Natural Resource Curse phenomenon does not occur at the provincial level on the island of Sumatra in the 2014-2019 period. However, based on the RRCI value, it shows that provinces with richer natural mining resources tend to face a higher Natural Resource Curse phenomenon. As a result, Jambi Province is the region with the highest RRCI of 1.26, with an NRDI of 54.9 and an RSDI of 53.9.*

**Keywords:** Resource Curse, Regional Resource Curse Index (RRCI), Natural Resource Curse Index (NRDI), Regional Sustainable Development Index (RSDI), Sumatera

## 1. PENDAHULUAN

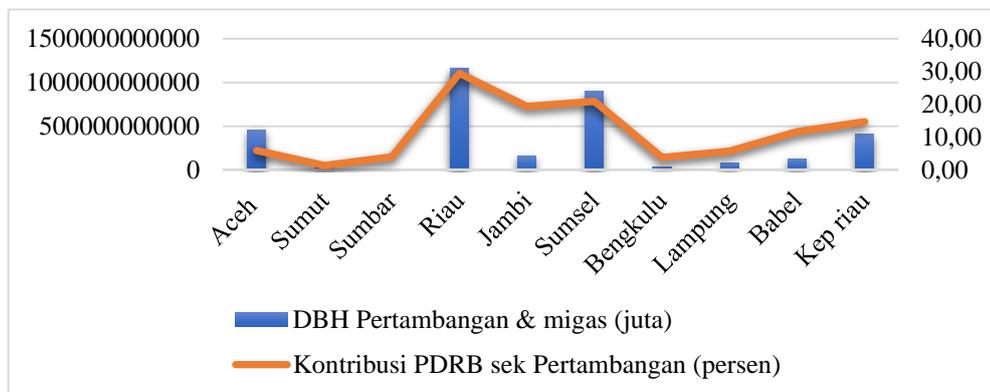
Sumber daya alam yang keberadaannya melimpah memberikan dampak besar bagi perekonomian suatu negara. Ketersediaan sumber daya alam berpotensi untuk meningkatkan pengembalian investasi dari sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam juga dapat mengatasi tantangan pembangunan yang utama, seperti kurangnya sumber daya keuangan untuk mendanai kepentingan umum. Sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan korelasi positif yang berarti bahwa semakin banyak sumber daya alam dapat meningkatkan kemakmuran ekonomi. Namun kenyataannya, negara yang berlimpah sumber daya alam justru menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan ekonomi yang lebih melambat dibandingkan negara dengan sumber daya alamnya relatif rendah.

Fenomena seperti ini dikenal sebagai "kutukan sumber daya alam" atau "Resource Curse". Auty (1994) dalam Ridena dkk (2021) berpendapat bahwa perkembangan pertama dari hipotesis kutukan sumber daya alam ini menunjukkan korelasi negatif antara kelimpahan sumber daya alam dan kinerja ekonomi. Auty berpendapat bahwa negara yang bergantung pada sumber daya alam, berusaha mengembangkan industri yang menguntungkan namun menghadapi masalah untuk meningkatkan perekonomian. Pandangan pesimis terhadap sumber daya alam menunjukkan bahwa mulai berkembang pada tahun 1980-an, ketika itu paradoks, dan bahwa penemuan gas alam di Belanda sebenarnya menunda produksinasional (Corden & Neary, 1982).

Kelimpahan sumber daya alam dapat memberikan dampak negatif seperti, kerusakan lingkungan, kemiskinan, konflik, dan lain-lain (Husen dkk.,2021). Dalam buku paradoks kelimpahan sumber daya alam (La Husen dkk, 2021) sebuah studi Arrelano di Peru, booming pertambangan justru memicu konflik lokal melibatkan penduduk lokal dan perusahaan melalui aksi gerakan sosial (Arrelano dan Yanguas, 2011). Hal ini juga terjadi di Afrika kelimpahan sumber daya alam memberikan konsekuensi negatif dengan munculnya korupsi, pemerintahan yang buruk, dan menghambat kualitas kelembagaan demokrasi tingkat lokal. Masih terjadi di Afrika, studi Patey menemukan bahwa keberadaan tambang minyak telah memperparah konflik dua negara antara Sudan dan Sudan Selatan. Menurut studi Patey, tambang minyak memicu praktek korupsi pejabat lokal, dan kerusakan lingkungan yang menyebabkan penderitaan ekonomi politik bagi masyarakat di Sudan Selatan (Patey, 2010).

Fenomena *Natural Resource Curse* atau kutukan sumber daya alam ini juga diteliti di Indonesia dengan berbagai macam hasil. Rosser (2004) menyimpulkan bahwa sementara Indonesia yang kaya sumber daya berhasil secara finansial dalam 30 tahun sebelum krisis Asia 1997, Rosser beralih ke komposisi ekspor, pendapatan pemerintah, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, sektor pertanian dan kesehatan dan pendidikan. Penelitian dari Ridena (2021), dimana hasilnya memberikan bukti kemungkinan terjadinya fenomena sumber daya alam (PDRB dan DBH Pertambangan migas) dan pertumbuhan output ekonomi. Dengan peningkatan satu persen pendapatan sumber daya alam pertambangan dan migas akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,28 sampai 0,34 persen. Dalam berbagai penelitian yang menganalisis hubungan SDA dengan kinerja perekonomian, data yang digunakan pun berbeda-beda. Ada yang memakai data DBH SDA baik itu migas maupun non migas, data ekspor bahan bakar, data ekspor mineral, data pendapatan pertambangan dari PDRB, dan lain-lain.

Pulau Sumatera adalah salah pulau terbesar di Indonesia, dengan luas kurang lebih 443.065,8 km<sup>2</sup>. Lokasi strategis dan sumber daya alam yang berlimpah dapat mendukung kegiatan ekonomi di Pulau Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Sumatera tumbuh positif, menurut BPS (2019). Kontribusinya terhadap Nasional mencapai 21 persen, menjadikannya nomor kedua setelah Pulau Jawa. Pertanian dan Migas merupakan penyumbang terbesar di Sumatera. Data berikut menunjukkan Kontribusi Pertambangan dan Penggalan Terhadap PDRB serta DBH Pertambangan Tahun 2014-2019.



Gambar 1. Rata-Rata Kontribusi Pertambangan Terhadap PDRB serta DBH Pertambangan Tahun 2014-2019

Sumber : BPS 10 Provinsi di Sumatera dan Kemenkeu 2022, diolah

Berdasarkan Gambar 1, Provinsi Riau merupakan provinsi dengan kontribusi sektor pertambangan tertinggi sebesar 29,44% diikuti oleh Sumatera Selatan di posisi kedua sebesar 20,88%. Kontribusi PDRB industri pertambangan di Riau dan Sumatera Selatan sebanding dengan DBH sumber daya pertambangan dan migas yang dihasilkan oleh negara bagian tertinggi di antara negara bagian lainnya. Ketergantungan terhadap migas tercermin dari porsi share PDRB migas yang berasal dari bagi hasil pemerintah pusat. Terdapat 3 sektor PDRB yang memiliki peran besar di Provinsi Riau, salah satunya adalah sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi PDRB pertambangan dan penggalian Riau mencapai 8 hingga 12% terhadap total PDB Indonesia pada tahun 2014-2018. Walaupun berkontribusi besar terhadap total PDB Indonesia, pertumbuhan ekonomi provinsi Riau sangat jauh dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan menempati peringkat provinsi yang paling rendah pertumbuhannya diantara provinsi lain di Sumatera sebesar 2,15%. Pertumbuhan ekonomi Riau sebesar 0,22% pada Tahun 2015, hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan sektor pertambangan yang turun cukup signifikan menjadi -6,95%.

Provinsi Aceh yang diketahui juga memiliki potensi kaya sumber daya alam, mempunyai kontribusi sektor pertambangan dan penggaliannya hanya sebesar 8,03% relatif rendah dibandingkan provinsi Riau dan Sumatera Selatan, dengan proporsi DBH pertambangan yang cukup tinggi. Aceh dan Riau merupakan dua provinsi yang diketahui memiliki pertambangan dan migas yang melimpah, namun pertumbuhan ekonominya terendah diantara provinsi lainnya. Diantara 3 wilayah dengan potensi kaya akan SDA, hanya Sumatera Selatan yang pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 5,24%. Dari ketimpangan perbedaan antara DBH dan Kontribusi PDRB pertambangan dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi pada pulau Sumatera ini, bisa jadi mengindikasikan terjadinya fenomena *Natural Resource Curse*.

Berdasarkan indikasi *Natural Resource Curse* yang terjadi di setiap provinsi, dapat digunakan untuk mengenali secara lebih bagaimana fenomena *Natural Resource Curse* terjadi dan bagaimana strategi yang perlu diambil oleh pemerintah daerah untuk keluar dari fenomena tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Pulau Sumatera memiliki potensi kekayaan sumber daya migas dan mineral lainnya, namun apakah hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Selain bertujuan untuk mengetahui besaran nilai *Natural Resource Curse*, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi determinan pertumbuhan ekonomi. Berlandaskan beberapa teori pertumbuhan ekonomi seperti teori pertumbuhan neo klasik dan teori konvergensi, terdapat determinan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor yang menjadi highlight dalam penelitian ini yang juga relevan dengan fenomena *Natural Resource Curse* yaitu faktor kelimpahan sumber daya alam yang diproksi dengan DBH pertambangan dan migas. Faktor lainnya yang dipertimbangkan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu investasi yang diproksi menggunakan data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), modal manusia (SDM) yang diproksi menggunakan data rata-rata lama sekolah, dan tingkat pendapatan awal. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui besaran nilai derajat *Natural Resource Curse* pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Tujuan lain yaitu untuk menganalisis pengaruh DBH pertambangan dan migas yang akan menunjukkan apakah fenomena *Natural Resource Curse* atau kutukan sumber daya alam terjadi pada tingkat provinsi di Pulau Sumatera, serta menganalisis variabel lain seperti pendapatan awal PDRB, investasi, dan modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera?

## 2. METODE

### 2.1 Definisi Operasional Variabel

1. *Regional Sustainable Development Index (RSDI)*  
*Regional Sustainable Development Index (RSDI)* atau Indeks Pembangunan Berkelanjutan Daerah menggunakan enam indikator kinerja pembangunan daerah yang mewakili tiga dimensi diantaranya : (1) tingkat pertumbuhan ekonomi, (2) tingkat pengangguran terbuka, (3) tingkat kemiskinan, (4) indeks pembangunan manusia (IPM), (5) indeks Gini, dan (6) indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).
2. *Natural Resource Dependency Index (NRDI)*

*Natural Resource Dependency Index* (NRDI) atau Indeks Ketergantungan SDA Variabel yang digunakan antara lain pendapatan SDA diukur oleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh daerah, untuk bagian dari dana transfer pusat yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan royalti SDA Pertambangan dan migas. Sementara itu, PDRB SDA per kapita diukur oleh PDRB ADHK tahun dasar 2010 dari sektor pertambangan per kapita.

3. Pertumbuhan Ekonomi (Y)  
Untuk variabel ini data yang digunakan yaitu data laju pertumbuhan PDRB tahun dasar 2010 ADHK menurut lapangan usaha.
4. Pendapatan Awal PDRB (Initial Income<sub>t-1</sub>)  
Untuk variabel pendapatan awal PDRB ini menggunakan data PDRB ADHK tahun dasar 2010 menurut lapangan usaha tahun sebelumnya (t-1).
5. Dana Bagi Hasil (DBH) SDA (Rent)  
DBH sumber daya alam Pertambangan dan migas ini merupakan proksi dari kelimpahan SDA. Data yang digunakan adalah dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam Pertambangan migas dan non migas untuk setiap provinsi.
6. Investasi (Invest)  
Untuk variabel investasi data digunakan yaitu data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang dinyatakan dalam persentase terhadap PDRB provinsi.
7. Modal Manusia (Edu)  
Data yang digunakan yaitu data rata-rata lama sekolah (years of schooling)

## 2.2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data 10 provinsi di Pulau Sumatera dengan periode penelitian dari tahun 2014-2019, dengan data yang diperoleh dari BPS, Kementerian Keuangan, dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada penelitian ini menggunakan software eviews 9 dan juga ms Excel 2010. Metode analisis yang digunakan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, menyesuaikan dengan tujuan utama dari penelitian, yaitu :

1. Tujuan pertama yaitu, menguji besaran *Natural Resource Curse*. Nilai besaran dari fenomena *Natural Resource Curse* atau kutukan sumber daya alam dapat diukur menggunakan sebuah indeks yang menghitung hubungan antara tingkat ketergantungan daerah terhadap SDA dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah tersebut (Rahma dkk, 2021). Berdasarkan dari penelitian Rahma dkk (2021) Nilai besaran dari fenomena *Natural Resource Curse* di tingkat provinsi ini dihitung menggunakan sebuah indeks yang dinamakan *Regional Resource Curse Index* (RRCI). Dalam menghitung nilai indeks tersebut diperlukan dua indeks lainnya, yaitu Indeks Ketergantungan Wilayah terhadap SDA atau *Natural Resource Dependency Index* (NRDI) dan juga Indeks Pembangunan Daerah Berkelanjutan atau *Regional Sustainable Development Index* (RSDI). Dalam menguji besaran *Natural Resource Curse* atau *Regional Natural Resource Curse Index* digunakan formula CWPM sebagai berikut:

$$RRCI_{it} = \sqrt{X_{it} \cdot Y_{it}}$$

Dengan  $X_{it}$ ,  $Y_{it}$  merupakan *weight product* dari NRDI dan RSDI yang didefinisikan :

$$X_{it} = \left( \frac{NRDI_{it}}{NRDI_{t_{min}}} \right) w_1$$

$$Y_{it} = \left( \frac{RSDI_{t_{max}}}{RSDI_{it}} \right) w_2$$

Dimana :

- $RRCI_{it}$  : Regional Resource Curse Index di provinsi i pada periode t;
- $NRDI_{it}$  : Natural Resource Dependency Index di provinsi i pada periode t;
- $NRDI_{t_{min}}$  : nilai minimum NRDI seluruh provinsi pada periode t;
- $RSDI_{it}$  : indeks pembangunan berkelanjutan di provinsi i pada periode t;
- $RSDI_{t_{max}}$  : nilai maksimum RSDI seluruh provinsi pada periode t;

$w_1$  : bobot untuk NRDI sebesar 0,5; dan  
 $w_2$  : bobot untuk RSDI sebesar 0,5

Untuk menghitung nilai Indeks Kutukan Sumber Daya Alam Regional (RRCI), diperlukan dua indeks: NRDI dan RSDI. Berdasarkan fenomena NRC, korelasi antara NRDI dan RSDI adalah negatif atau sebaliknya. Provinsi dengan skor NRDI (ketergantungan pada sumber daya alam) yang relatif tinggi sebenarnya memiliki skor RSDI (pembangunan berkelanjutan) yang relatif rendah dibandingkan provinsi lain dengan skor NRDI yang rendah.

- *Regional Sustainable Development Index (RSDI)*

Nilai RSDI ini mengartikan bahwa semakin besar nilai RSDI semakin baik pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Untuk ketiga indikator yang tidak berbentuk indeks yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, dinormalisasi terlebih dahulu menggunakan persamaan 1-3, dengan nilai maksimum dan minimum masing-masing indikator menjadi nilai maksimum dan minimum periode 2014-2019.

$$IEG = \frac{(EGR_i - EGR_{minimum})}{(EGR_{maximum} - EGR_{minimum})} \quad (1)$$

$$IUNP = \frac{(UNP_i - UNP_{minimum})}{(UNP_{maximum} - UNP_{minimum})} \quad (2)$$

$$IPOV = \frac{(POV_i - POV_{minimum})}{(POV_{maximum} - POV_{minimum})} \quad (3)$$

Ket :

IEG : pertumbuhan ekonomi

IUNP : pengangguran terbuka

IPOV : tingkat kemiskinan

Max : nilai tertinggi per variabel di setiap provinsi

Min : nilai terendah per variabel di setiap provinsi

Kemudian setelah mendapatkan nilai dari indeks diatas, selanjutnya masukkan dalam rumus dibawah untuk mendapatkan nilai tiap provinsi :

$$RSDI = \sqrt[6]{IEG \times HDI \times EQI \times (1 - IPOV) \times (1 - GI) \times (1 - IUNP)}$$

Ket :

RSDI : *Regional Sustainable Development Index* atau Indeks pembangunan berkelanjutan daerah

IEG : pertumbuhan ekonomi

IUNP : pengangguran terbuka

IPOV : tingkat kemiskinan

HDI : IKLH

EQI : IPM

GI : indeks gini

- *Natural Resource Dependency Index (NRDI)*

Untuk *Natural Resource Dependency Index* (NRDI, dua indikator yaitu, PDRB sektor Pertambangan dan migas perkapita dan Dana Bagi Hasil Pertambangan dan migas perkapita, dijadikan indeks PDRBT dan indeks DBHT dengan menggunakan persamaan 1 dan 2 dibawah ini :

$$IPDRBT_i = \frac{(PDRBT_{it} - PDRBT_{min})}{(PDRBT_{max} - PDRBT_{min})} \times 100 \quad (1)$$

$$IDBHT_i = \frac{(DBHT_{it} - DBHT_{min})}{(DBHT_{max} - DBHT_{min})} \times 100 \quad (2)$$

Setelah mendapatkan nilai dari IPDRBT dan IDBHT, masukkan kedalam rumus dibawah untuk mendapatkan nilai NRDI.

$$NRDI_i = \frac{IPDRBT_i + IDBHT_i}{2} \quad (3)$$

Ket :

- PDRBT : PDRB sektor pertambangan dan migas per kapita
- DBHT : DBH sektor Pertambangan dan migas per kapita
- IPDRBT : Indeks PDRB sektor pertambangan perkapita
- IDBHT : indeks DBH sektor Pertambangan dan migas perkapita
- NRDI : *Natural Resource Dependency Index*
- It : tahun
- Max : nilai tertinggi per variabel di setiap provinsi
- Min : nilai terendah per variabel di setiap provinsi

2. Tujuan kedua penelitian ini menganalisis fenomena kelimpahan sumber daya dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan menunjukkan apakah fenomena *Natural Resource Curse* terjadi atau tidak di Pulau Sumatera. Metode estimasi data panel digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan regresi berganda. Adapun spesifikasi model yang digunakan :

$$\text{Ln}Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Lnincome}_{it-1} + \beta_2 \text{Lnrent}_{it} + \beta_3 \text{Lninves}_{it} + \beta_4 \text{Lnedu}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

- Y : Laju pertumbuhan ekonomi (persen)
- Income: pendapatan awal PDRB (rupiah)
- rent : dana bagi hasil (DBH) Pertambangan dan migas (rupiah)
- invest : pembentukan modal tetap bruto (persen)
- edu : rata-rata lama sekolah (persen)
- $\beta_0$  : konstanta
- $\beta_{1,2,3,4}$  : koefisien regresi
- i : individu provinsi
- t : waktu tahun
- $\varepsilon$  : error term

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 *Regional Natural Resource Curse Index (RRCI)*

Nilai besaran dari fenomena *Natural Resource Curse* atau kutukan sumber daya alam dapat diukur menggunakan sebuah indeks yang menghitung kekuatan hubungan antara tingkat ketergantungan daerah terhadap SDA dengan tingkat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Rahma dkk, 2021). Berdasarkan dari penelitian Rahma dkk (2021), nilai besaran dari fenomena *Natural Resource Curse* di tingkat provinsi dihitung menggunakan sebuah indeks yang dinamakan *Regional Resource Curse Index (RRCI)*. Dalam menghitung nilai indeks tersebut diperlukan dua indeks lainnya, yaitu Indeks Ketergantungan Wilayah terhadap SDA atau *Natural Resource Dependency Index (NRDI)* juga Indeks Pembangunan Daerah Berkelanjutan atau *Regional Sustainable Development Index (RSDI)*

Tabel 1 Hasil Penghitungan dari *Natural Resource Dependency Index (NRDI)* Sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera (Persen)

No.	Provinsi	IPDRBT	IDBHT	NRDI
1	Jambi	38,788	70,929	54,9
2	Kepulauan Bangka Belitung	56,484	47,015	51,7

3	Sumatera Utara	50,826	44,300	47,6
4	Lampung	54,673	40,424	47,5
5	Bengkulu	57,669	34,702	46,2
6	Sumatera barat	37,576	35,306	36,4
7	Riau	47,354	22,960	35,2
8	Sumatera selatan	38,799	26,952	32,9
9	Kepulauan Riau	40,332	24,864	32,6
10	Aceh	27,749	24,024	25,9

Sumber : data diolah, 2022

Tabel 1 menyajikan hasil penghitungan dari *Natural Resource Dependency Index* (NRDI) pada sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera periode 2014-2019 yang menunjukkan besarnya ketergantungan suatu daerah terhadap SDA khususnya pertambangan dan migas. Makin tinggi nilai dari NRDI ini berarti ketergantungan daerah terhadap SDA makin besar, yang artinya semakin besar nilainya justru berpengaruh negatif terhadap daerah tersebut. Dapat terlihat bahwa provinsi yang memiliki nilai NRDI tertinggi yakni Provinsi Jambi dengan nilai NRDI sebesar 54,9. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Provinsi Jambi terhadap sektor pertambangan dan migas sangatlah besar.

Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata PDRB perkapita sektor pertambangan di Provinsi Jambi sebesar 38,78 juta /kapita/tahun dalam kurun waktu 2014-2019. Meskipun untuk rata-rata PDRB perkapita sektor pertambangan tertinggi adalah Provinsi Aceh, sektor pertambangan dan migas Aceh bukanlah sektor pendukung terbesar dalam PDRB provinsi tersebut. Sedangkan Provinsi Jambi, berdasarkan publikasi BPS (2020) sektor pertambangan menjadi sektor terbesar kedua dalam kontribusi PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Provinsi Jambi terhadap sektor pertambangan masih besar, karena terbukti sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan data BPS sektor pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Provinsi Jambi.

Ketergantungan Provinsi Jambi terhadap sektor pertambangan juga terlihat dalam ketergantungan fiskalnya yakni DBH pertambangan dan migas. Dengan rata-rata pembagian DBH pertambangan dan migas selama Tahun 2014-2019 sebesar Rp 159.889.326.894., walaupun rata-rata jumlah Dana Bagi Hasil yang diterima Provinsi Jambi ini tidak sebesar provinsi lainnya seperti Riau, Aceh, Sumatera Selatan. Namun indeks DBH perkapita menunjukkan bahwa Provinsi Jambi tertinggi diantara provinsi lainnya di Sumatera. Kemudian ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di urutan kedua dengan ketergantungan SDA sebesar 51,7.

Tabel 2 Hasil Penghitungan *Regional Sustainable Development Index* (RSDI) Sepuluh Provinsi di Sumatera (Persen)

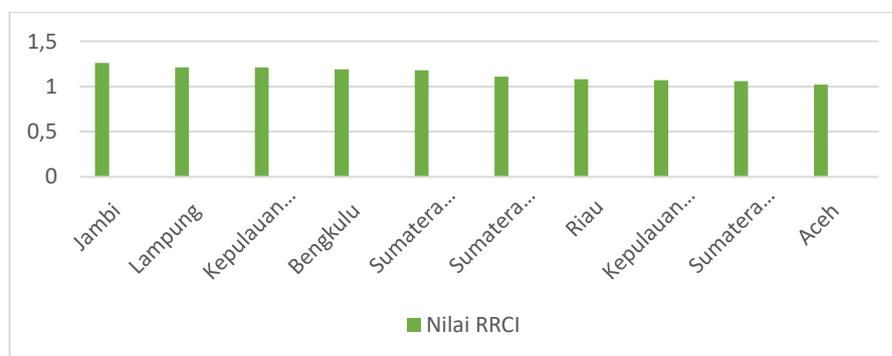
No.	Provinsi	RSDI
1	Sumatera selatan	63,2
2	Riau	62,4
3	Kepulauan Riau	60,5
4	Kepulauan Bangka Belitung	59,8
5	Sumatera Utara	59,6
6	Aceh	59,3

7	Sumatera barat	57,9
8	Bengkulu	55,5
9	Lampung	54,5
10	Jambi	53,9

Sumber : data diolah menggunakan ms. Excel (2022)

Tabel 2 menyajikan hasil penghitungan dari *Regional Sustainable Development Index* (RSDI) sepuluh Provinsi di Sumatera periode tahun 2014-2019. *Regional Sustainable Development Index* (RSDI) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan pembangunan daerah, dan mengukur tingkat pembangunan keberlanjutan. Dalam penelitian ini telah dijelaskan bahwa makin tinggi nilai RSDI, maka makin baik kinerja pembangunan provinsi tersebut. Provinsi Sumatera selatan merupakan provinsi dengan nilai RSDI tertinggi sebesar 63,2 dan kemudian kedua ada Provinsi Riau sebesar 62,4. Hal ini artinya kinerja pembangunan di dua provinsi tersebut tertinggi diantara provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Menurut Rahma dkk (2019), nilai RSDI ini perlu disikapi lebih hati-hati jika secara pertumbuhan ekonominya sektor yang paling berpengaruh adalah sektor pertambangan, karena sektor tersebut merupakan sumber daya yang sifatnya tidak dapat diperbarui dan akan habis. Harusnya sektor yang paling berpengaruh untuk RSDI yang tinggi adalah sektor lain yang memiliki dampak dan potensi yang lebih panjang kedepannya.

Dalam hasil penelitian ini terjadi pada Provinsi Riau, yang dimana sektor pertambangan dan penggalian menjadi salah satu sektor unggulan yang mempengaruhi tingginya pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut. Sedangkan Provinsi Sumatera Selatan sektor yang menopang pertumbuhan ekonominya bukanlah sektor pertambangan. Kemudian provinsi dengan nilai RSDI terendah yakni Jambi dengan nilai RSDI sebesar 53,9. Yang artinya kinerja pembangunan di provinsi tersebut rendah diantara provinsi lainnya di Pulau Sumatera



Gambar 2. Hasil Penghitungan *Regional Resource Curse Index* (RRCI) Sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera  
 Sumber : data diolah

Gambar 2 menyajikan hasil penghitungan dari *Regional Resource Curse Index* (RRCI) sepuluh provinsi di Sumatera periode tahun 2014-2019. *Regional Resource Curse Index* (RRCI) sebuah indeks yang menghitung hubungan antara tingkat ketergantungan daerah terhadap SDA dengan tingkat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Rahma dkk, 2021). Provinsi Jambi menjadi provinsi dengan nilai RRCI tertinggi, hal ini sebelumnya telah ditunjukkan oleh nilai dari RSDI dengan urutan terakhir dari provinsi lainnya, yang menunjukkan bahwa tidak cukup mampunya provinsi tersebut dalam menciptakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dilihat juga dari nilai NRDI yang tertinggi diantara provinsi lainnya, yang menunjukkan bahwa ketergantungan Provinsi Jambi terhadap SDA khususnya pertambangan yang cukup tinggi. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama kurun waktu 2014-2019 relatif tinggi, dimana subsektor pertambangan

minyak gas bumi mendominasi. Hal ini juga mengonfirmasi temuan dari penelitian Rahma dkk (2021) yang menunjukkan bahwa provinsi dengan ketergantungan atau kontribusi sektor pertambangannya lebih besar, memiliki peluang lebih besar untuk terkena fenomena *Natural Resource Curse*. Dalam penelitian Rahma dkk (2021) menjelaskan bahwa hubungan antara provinsi-provinsi yang nilai RSDI lebih tinggi cenderung memiliki nilai RRCI yang rendah. Artinya provinsi dengan pembangunan berkelanjutan yang tinggi memiliki kecenderungan lebih rendah untuk terkena fenomena *Natural Resource Curse*. Perbedaan nilai RRCI antar provinsi yang tidak terlalu besar, disebabkan karena setiap daerah atau provinsi di Sumatera masing-masing memiliki komoditi pertambangan.

**3.2 Pengaruh Kelimpahan Sumber Daya Alam dan Variabel Lain**

Setelah dilakukan uji model, maka didapatkan model regresi yang terpilih yakni menggunakan *Fixed Effect Model*. Berikut dibawah ini hasil estimasi regresi *Fixed Effect Model* :

Tabel 3 Hasil Estimasi Data Panel dengan Pendekatan *Fixed Effect*

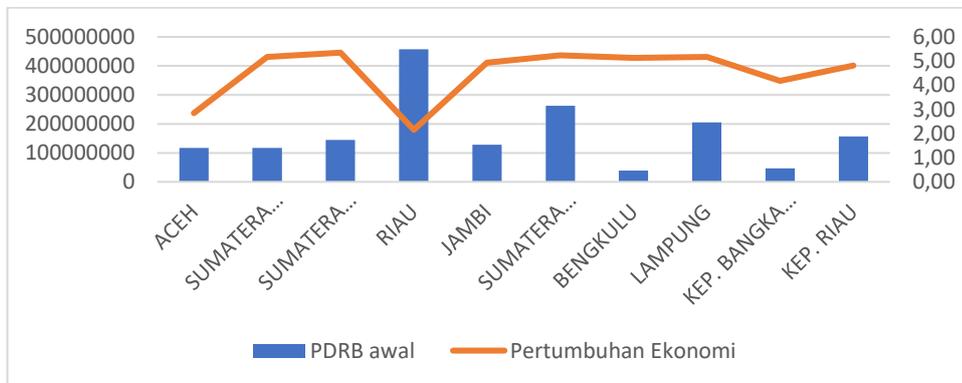
Variable	Coefficient	Std.error	t-statistic	Prob.
C	76,45360	22,00755	3,473971	0,0011
LNINCOME	-6,521826	1,659233	-3,930626	0,0003
LNRENT	0,013480	0,024520	0,549773	0,5851
LNINVEST	-1,676724	1,414780	-1,185149	0,2420
LNEDU	24,97377	5,953085	4,195097	0,0001

Sumber: data diolah menggunakan E-views 9, 2022

• **Pengaruh Pendapatan Awal PDRB Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera**

Pendapatan awal PDRB adalah nominal PDRB dengan periode tahun sebelumnya. Hipotesis untuk Initial PDRB bahwa variabel Initial PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan neo-klasik, disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki sifat *diminishing*. Yaitu, jika provinsi dengan pendapatan awal yang relatif sudah tinggi cenderung memiliki pertumbuhan yang melambat.

Berdasarkan dari hasil regresi dengan model *Fixed Effect* pada Tabel 2, menunjukkan bahwa variabel Initial PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sumatera dengan nilai koefisien regresi sebesar -6,521826, yang artinya dengan terjadinya peningkatan nilai PDRB awal sebesar 1% maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,521826%. Dengan nilai t-statistik sebesar 3,9306 yang lebih besar dari t- tabel sebesar 1,6723 berarti Initial PDRB berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan teori konvergensi bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki sifat *diminishing*.



Gambar 3 Rata-Rata PDRB Awal (Milyar) Dan Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Provinsi Di Pulau Sumatera 2014-2019

Sumber : BPS, data diolah 2022

Gambar 3 menunjukkan rata-rata PDRB awal dan pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sumatera 2014-2019. Berdasarkan dari gambar tersebut, dapat diketahui bahwa provinsi yang memiliki PDRB awal tinggi cenderung pertumbuhannya rendah. Provinsi yang mengalami kondisi tersebut adalah Provinsi Riau, dimana PDRB awalnya sudah tinggi sebesar 457512915, namun pertumbuhannya tergolong rendah sebesar 2,84%. Jika dibandingkan dengan provinsi lain yaitu Provinsi Sumatera Barat yang memiliki PDRB awal rendah sebesar 144685957, dengan pertumbuhannya yang tergolong tinggi yakni sebesar 5,35%. Hal ini membuktikan dari teori pertumbuhan neo-klasik bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki sifat diminishing. Yaitu, provinsi dengan pendapatan awal yang relatif sudah tinggi cenderung memiliki pertumbuhan yang melambat.

#### • Pengaruh DBH Pertambangan dan Migas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera

Dana Bagi Hasil pertambangan dan migas proksi dari kelimpahan sumber daya alam merupakan variabel utama atau fokus utama dari penelitian. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk melihat terjadi tidaknya fenomena *Natural Resource Curse* provinsi di Pulau Sumatera. Fenomena *Natural Resource Curse* ini terjadi ketika kelimpahan SDA yang dimiliki sebuah daerah atau wilayah justru memiliki kesejahteraan yang rendah. Dalam buku *Escaping The Resource Curse* penyebab terjadinya fenomena kutukan sumber daya alam yaitu *dutch diases* (terhambatnya sektor lain karena ketergantungan SDA), volatilitas harga, kegagalan penggunaan pendapatan, investasi pendidikan yang minim.

Berdasarkan hasil regresi menggunakan model *Fixed Effect* pada Tabel 2, menunjukkan bahwa variabel DBH pertambangan dan migas tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan koefisien nilai regresi sebesar 0,013480, berarti jika terjadi peningkatan DBH pertambangan dan migas sebesar 1% maka akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,013480%. Hal ini menandakan bahwa fenomena *Natural resource curse* tidak terjadi pada Provinsi di Pulau Sumatera, yakni provinsi yang memiliki kekayaan SDA khususnya pertambangan dan migas justru memiliki kesejahteraan yang rendah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil dari regresi bahwa variabel DBH pertambangan dan migas memiliki arah pengaruh positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.

Penelitian lain dengan hasil sama yakni penelitian dari Fahriza dan Hartono (2018), yang hasilnya mereka tidak menemukan bahwa adanya kemungkinan terjadi kutukan sumber daya alam pada tingkat provinsi di Indonesia. Arah pengaruh positif DBH pertambangan dan migas dalam penelitian ini diduga terjadi karena pendapatan dari dana bagi hasil pertambangan dan migas digunakan sepenuhnya untuk belanja sektor yang lebih produktif sehingga mampu mendorong sektor lainnya untuk berkembang serta mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 4 DBH Pertambangan dan Migas (juta), Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Provinsi Sumatera Selatan 2014-2019

Tahun	DBH pertambangan dan migas	Pertumbuhan ekonomi
2014	Rp1.377.143.382.814	4,79
2015	Rp742.070.136.400	4,42
2016	Rp701.724.572.474	5,04
2017	Rp873.339.852.661	5,51
2018	Rp928.758.456.106	6,01
2019	Rp759.813.999.850	5,69

Sumber : BPS dan Kemenkeu, data diolah 2022

Tabel 3 menunjukkan nilai dari DBH pertambangan dan migas serta pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2014-2019. Terlihat bahwa setiap tahunnya DBH Pertambangan dan Migas yang didapatkan angkanya berfluktuasi, dengan pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya tetap meningkat. Berdasarkan data dari BPS, Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah penghasil pertambangan dan migas yang ada di Pulau Sumatera. Meskipun memiliki sektor pertambangan yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan juga didukung oleh sektor lain yang kontribusi dan pertumbuhannya selalu meningkat jika dibandingkan dengan sektor pertambangan yang terus menurun. Hal ini dibuktikan oleh gambar dibawah yang menunjukkan distribusi PDRB persektor Sumatera Selatan.



Gambar 4. Distribusi PDRB Persektor di Provinsi Sumatera Selatan 2014-2019 (dalam persen)

Sumber : BPS, data diolah 2022

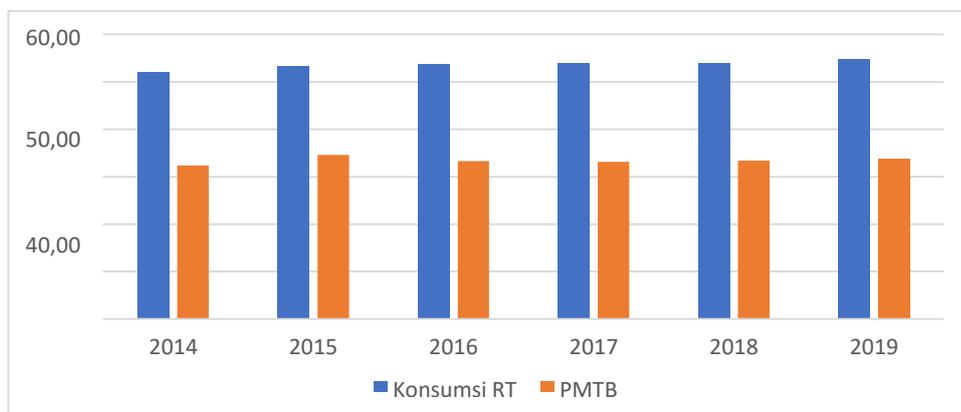
Gambar 4 dapat dilihat bahwa sektor-sektor besar selain pertambangan yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, yaitu sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar, dan administrasi pemerintahan. Untuk sektor industri pengolahan secara nominal mengalami peningkatan dari 60,9 triliun pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 88,1 triliun pada tahun 2019. Sektor perdagangan besar juga meningkat selama periode 2014-2019. Menurut Fahriza dan Hartono (2018) keberhasilan pengelolaan sda khususnya pertambangan dan migas menjadi faktor penting keberhasilan dalam pembangunan jangka panjang. Pendapatan dari komoditi migas tidak dapat terus menerus dijadikan tumpuan bagi pemerintah daerah, dikarenakan pertambangan dan migas merupakan SDA yang tidak dapat diperbarui dan akan habis. Maka dari itu hal yang penting untuk dikerjakan pemerintah adalah peningkatan investasi publik dari dana pendapatan migas.

• **Pengaruh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera**

Kegiatan investasi merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/daerah. Investasi meliputi investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, investasi fisik dapat dijelaskan oleh PMTB dan juga perubahan inventori. Menurut BPS pembentukan modal tetap bruto (PMTB) merupakan komponen PDRB menurut pengeluaran, juga dapat menjelaskan mengenai pendapatan yang direalisasikan menjadi investasi fisik.

Berdasarkan dari hasil regresi dengan model *Fixed Effect* pada Tabel 2, menunjukkan bahwa variabel pembentukan modal tetap bruto (PMTB) memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sumatera dengan nilai koefisien regresi sebesar - 1,676724, yang artinya dengan terjadinya peningkatan sebesar 1% investasi dalam hal ini adalah PMTB, maka akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,676724%. Akan tetapi walaupun memberikan arah pengaruh negatif, variabel PMTB mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak signifikan.

Tasrif (2019) dalam Pudjianto dkk (2021) menyebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satu caranya yakni meningkatkan investasi dalam hal ini adalah PMTB melalui pengalokasian anggaran untuk belanja barang modal termasuk belanja untuk infrastruktur fisik. Dengan adanya pengalokasian tersebut akan meningkatkan produktivitas sehingga terjadi peningkatan dalam hal nilai tambah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi



Gambar 5. Rata-Rata Distribusi Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi di Pulau Sumatera 2014-2019 (dalam persen)

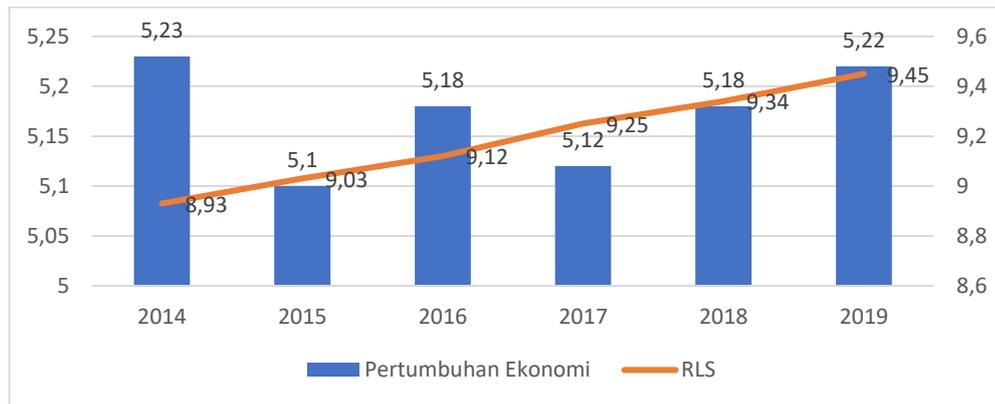
Sumber : BPS, data diolah 2022

Gambar 5 menunjukkan bahwa rata-rata penggunaan PDRB untuk investasi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan penggunaan PDRB untuk konsumsi rumah tangga. Penggunaan PDRB untuk investasi dalam hal ini adalah PMTB dari tahun 2014-2019 nilainya berfluktuasi, sedangkan konsumsi rumah tangga nilainya selalu naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan data diatas menunjukkan faktor dari arah pengaruh negatif investasi dalam hal ini PMTB, dikarenakan penggunaan PDRB untuk konsumsi lebih besar jika dibandingkan dengan penggunaan PDRB untuk investasi. Jadi meskipun setiap tahunnya pengeluaran PDRB untuk investasi meningkat, tetapi distribusinya lebih kecil dibandingkan pengeluaran untuk konsumsi.

#### • Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam penghitungan IPM khususnya sektor pendidikan. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Pendidikan memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang terampil, handal, dan tersedia sesuai dengan kebutuhan pembangunan negara. Semakin besar akumulasi investasi modal manusia, semakin tinggi produktivitas kerjanya (Petiana dkk, 2015). Dengan begitu pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam modal manusia sangat penting meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan dari hasil regresi dengan model *Fixed Effect* pada Tabel 2, menunjukkan bahwa variabel rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sumatera dengan nilai koefisien regresi sebesar 24,97377, yang artinya dengan terjadinya peningkatan sebesar 1 tahun rata-rata lama sekolah maka akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,455167%.

Penelitian lain dengan hasil yang sama yaitu penelitian dari Kristian Brilyawan (2021) yang variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendidikan merupakan faktor penting bagi pertumbuhan modal manusia, kualitas sumberdaya manusia yang tinggi mendorong peningkatan produktivitas masyarakat yang kemudian akan meningkatkan output pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi memiliki hubungan erat dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mempermudah berbagai kebutuhan taraf hidup yang terus meningkat (Brilyawan, 2021).



Gambar 6 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Dan Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Provinsi Sumatera Utara 2014-2019

Sumber : BPS, data diolah 2022

Berdasarkan Gambar 6, peningkatan dari rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi tersebut. Setiap tahunnya dari 2014-2019 rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan. Rata-rata lama sekolah tertinggi ada pada Tahun 2019 yang mencapai 9,45 Tahun. Artinya bahwa rata-rata pendidikan penduduk di Sumatera Utara sudah setingkat kelas 3 SMP. Angka ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan angka Nasional yang rata-rata masih mencapai kelas 2 SMP. Arah pengaruh positif rata-rata lama sekolah ini sesuai dengan teori dari modal manusia yang menyebutkan bahwa investasi dalam pendidikan sangat penting guna meningkatkan produktivitas masyarakat, yang akhirnya akan mampu meningkatkan output perekonomian.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil RRCI, provinsi yang memiliki nilai indeks tertinggi adalah Provinsi Jambi dengan nilai RRCI sebesar 1,26. Dengan nilai NRDI tertinggi juga, membuktikan bahwa sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi selama kurun waktu 2014-2019 relatif tinggi, dimana subsektor pertambangan minyak gas bumi mendominasi. Dengan nilai RSDI terendah sebesar 53,9.

Pendapatan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera. Yang artinya ketika terjadi kenaikan pendapatan PDRB maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Hal ini membuktikan teori pertumbuhan neoklasik bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki sifat diminishing. Yang artinya, provinsi dengan pendapatan awal yang relatif sudah tinggi cenderung memiliki pertumbuhan yang melambat.

Dana bagi hasil pertambangan dan migas sebagai variabel utama dalam penelitian ini berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Yang artinya yaitu ketika terjadi kenaikan dana bagi hasil pertambangan dan migas, maka akan diikuti oleh naiknya pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sumatera. Maka fenomena *Natural Resource Curse* ini tidak terjadi provinsi di Pulau Sumatera. Karena dengan hasil koefisien variabel kelimpahan sumber daya alam yang diproksi dengan dana bagi hasil pertambangan dan migas yang menunjukkan koefisien positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Yang artinya ketika terjadi peningkatan PMTB maka akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sumatera.

Rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera. Yang artinya ketika terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah maka akan terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sumatera.

## REFERENCES

- Admin. (2013). *Bappeda Buleleng*. Dipetik Februari Rabu, 2022, dari [bappeda.bulelengkab.go.id](https://bappeda.bulelengkab.go.id):  
<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-berkelanjutan-1>
- Ahmad Fahriza, D. H. (2018). Pengaruh Minyak dan Gas Terhadap Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Regional : Sebuah Kutukan atau Anugerah? *Ekuitas : Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 2, Nomor 2*.
- Ahmad Fauzi, A. O. (2014). The Measurement of Sustainable Development in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 15, Nomor 1, Juni 2014*.
- Ahmad Komarulzaman, A. S. (2006). Testing the Natural Resource. *Working Paper in Economics and Development Studies*.
- BPS. (2022, Februari 1). Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/>
- Hania Rahma, A. F. (2019). Development of a Composite Measure of Regional Sustainable Development in Indonesia. *Sustainability*. doi:10.3390/su11205861
- Hania Rahma, A. F. (2021). Fenomena Natural Resource Curse dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Volume 21*.
- Hary Pudjianto, N. W. (2021). DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2019. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers* ( 978-602-1643-67-9).
- Haryanto, J. T. (2018). Is The Curse Of The Natural Resource Occuring In Indonesia? A Preliminary finding. *Jurnal BPPK, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2018*.
- Hidayatturrahman, M. (2018). Analisis Curse Theory Pada Sumber Daya Alam Migas Bagi Warga Madura. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Juni 2018, p. 12-20, Vol 14, No 01*.
- KemenLHK. (2022, Februari 1). Diambil kembali dari Website KemenLHK: <https://www.menlhk.go.id/site/post/124>
- Kristian Briyawan, P. B. (2021). Pengaruh Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2019. *Diponegoro Journal Of Economics, 10 No 1*. Diambil kembali dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol. 9 No. 1*.
- La Husen Zuada, E. S. (2021). *Paradoks Kelimpahan Sumber Daya Alam*. Kendari: CV Literasi Indonesia.
- Macartan Humphreys, J. D. (2007). *Escaping The Resource Curse* .
- ML, J. (2010). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Rohman, M. S. (2012). Pengujian Resource Curse di Indonesia Tahun 1980-2009 Studi Kasus Pada Komoditas Ekspor Bahan Bakar. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga*.
- Rosana, M. (2018). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal KELOLA : Jurnal Ilmu Sosial, Vol 1 No 1 Tahun 2018*.
- Salim, E. (2020, Juli). *Madani*. Dipetik Februari Rabu, 2022, dari [madaniberkelanjutan.id](https://madaniberkelanjutan.id):  
<https://madaniberkelanjutan.id/2020/07/21/pembangunan-berkelanjutan>
- Sedwivia Ridena, N. W. (2021). Testing the Existence of Natural Resource Curse in Indonesia: The Role of Financial Development. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol 22 No 2*.
- Sholikin, A. (2018). Kutukan Sumber Daya Alam (Resource curse). doi:DOI:10.31227/osf.io/d4shn
- Smith, M. P. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Viale, J. C. (2016). Is There Evidence for a Subnational Resource Curse? *Policy Paper*.
- Zaini, A. (2017). Pengaruh Kekayaan Sumber Daya Alam Batubara Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Borneo Administrator, Volume 13/No. 2/2017*.